

PENGEMBANGAN CAMPUS BASED CIVIC EDUCATION DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Tukiran Taniredja, Sri Harmianto, Eko Priyanto

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This research aims, (1) create campus-based civic education Muhammadiyah University; (2) analyze the differences in democratic attitudes of students before and after instruction civic education; (3) analyze the relationship between the responses of students with learning PKn democratic manner after obtaining student learning civic education. Entire study population ivic education. lecturers and students at Muhammadiyah University of Central Java contracting Citizenship Education courses. Sampling technique with random sampling area. Faculty research sample civic education and college students Muhammadiyah University: Surakarta, Semarang, Magelang, Purworejo, and Purwokerto. Methods of data collection with the scale of attitude / opinioner, questionnaires, interviews and documentaries. Qualitative data, so have the meanings described a systematic and systemic, with the technique, data reduction, data display and conclusion. Before quantitative data were analyzed using statistical techniques, tested homogenitas and normality of data Results of data analysis to conclude (1) to create campus-based civic education is needed to Muhammadiyah University (a) the institution of a democratic institution that is anti-violence, constitutional and provide real benefits for the advancement of society; (b) The learning process is interactive, fun, challenging , motivate learners to participate actively, and to provide sufficient room for initiative, creativity, and independence, by placing the student as the subject of education, partners in the learning process, and as a congregation, members of the family, society and citizens, (c) learning is educative process, which occurs inside a critical discussion, analytical, inductive, deductive, and reflective through creative participatory dialogue, (2) there are significant differences in democratic attitudes of students before and after instruction civic education; (3) there was a significant relationship between responses civic education with students on learning of democratic attitudes of students after instruction civic education.

Keywords: *Civic Education, the campus-based civic education.*

A. PENDAHULUAN

Menurut *International Commission of Jurists* (2003:1), kita kurang berhasil menyelenggarakan PKn seperti diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi maupun cara penyampaian sangat tidak memuaskan. Isinya hanya mencatat hal-hal yang baik-baik, cara penyampaian pun searah, bahkan indoktrinatif. Padahal salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis ialah adanya PKn (civics). Sedangkan menurut Azra (2003:10), kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan cara berpikir (*world view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan pendidik dan masyarakat sekolah/universitas umumnya besumber dari tiga hal. *Pertama*, secara substantif, PKn, Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif, *Kedua*, kalau pun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang, karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas diantara teori dan wacana 45 yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada. Bahkan pada tingkat sekolah/universitas sekalipun, diskrepansi itu sering pula terlihat dalam bentuk otoritanisme bahkan feodalisme orang-orang sekolah dan universitas itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami, kalau sekolah/universitas gagal untuk membawa peserta didik untuk “mengalami demokrasi”.

Perguruan tinggi dari perspektif politik merupakan suatu lembaga yang di harapkan sebagai media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan warga bangsa untuk memasuki kelompok elit politik. Cepat atau lambat elit politik masyarakat dan politisi Indonesia akan merupakan lulusan lembaga tinggi. Dalam tindakan yang rasional tersebut diharapkan keputusan yang diambil akan mendatangkan keuntungan tidak saja bagi diri dan keluarga tapi juga seluruh masyarakat dan bangsa. Dengan kalimat singkat, PKn di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menjadi bangsa yang “mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi juga sulit untuk diperbudak “ (Zamroni, 2003 :10)

Terjadinya kegagalan seperti disebutkan di atas, kiranya sudah sangat mendesak diadakannya perubahan paradigma dalam PKn yang dikembangkan pada lembaga pendidikan. Di samping perubahan paradigma dalam bidang materi, tidak kalah pentingnya adalah perubahan dalam bidang paradigma metodologis. Apabila perubahan pada paradigma yang pertama diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamika perubahan sosial yang berkembang, maka perubahan paradigma metodologis diarahkan untuk mengembangkan daya nalar peserta didik dalam kelas-kelas yang partisipatif.

PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Kewarganegaraan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Zamroni (2003) materi Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mencakup : (1) Kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, Demokrasi, *Open Society*, Order Politik; (2) Sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 berikut sejarah dan stasi kelahirannya; (3) Bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia; (4) Warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya; (5) *Civic education*, politik, pemerintahan, demokrasi ditinjau dari perspektif Islam.

Materi PKn (*civic education*) dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah (2003) yang diperuntukkan bagi mahasiswa PTM meliputi: Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan dan Cita-cita Menuju Masyarakat Madani, Tinjauan Umum tentang Nilai-Nilai Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, Transformasi Nilai Demokrasi dalam Keluarga dan Masyarakat, Membangun Identitas Nasional, Tata Dunia Baru dalam Globalisasi, Ekonomi Kerakyatan dan Etos Ekonomi sebagai Basis Kekuatan Nasional Indonesia dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Tim ICCE UIN Jakarta (2003:xv-xx) dalam bukunya “Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani” mengembangkan materi PKn bahan ajarnya terdiri dari 10 (sepuluh) materi pokok pembelajaran Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), yakni Pendahuluan, Identitas Nasional, Negara, Kewarganegaraan, Konstitusi, Demokrasi, Otonomi Daerah, *Good Governance*, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.

Menurut Zamroni (2001:10) materi PKn yang baik adalah apa yang ada pada kehidupan warga negara itu sendiri. hal itu berarti bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan. Dalam era global sebagaimana dewasa ini kehidupan suatu masyarakat dengan segala aspek tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global. Oleh karenanya, mahasiswa tidak saja perlu mempelajari dan memahami sistem politik dan bentuk pemerintahan bangsa sendiri, tetapi juga harus mengkaji dan memahami berbagai sistem politik dan berbagai bentuk pemerintahan yang ada dengan berbagai variasi, misalnya sejarah, budaya, ekonomi dan geografi.

Tentang materi dan objek Civics, juga ada beberapa pendapat dan perbedaan. Soemantri (1976:25) berpendapat,

“Studi civics dan *Civic Education* adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Termasuk dalam objek studi ini ialah : (a) tingkah laku; (b) tipe pertumbuhan berpikir; (c) potensi yang ada dalam setiap diri warga negara; (d) hak dan kewajiban (e) cita-cita dan aspirasi; (f) kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila); dan g) usaha, kegiatan, partisipasi tanggungjawab. Karena itu materi Civics hendaknya memasukkan

unsur (a) lingkungan fisik; (b) sosial, pendidikan, kesehatan; (c) ekonomi, keuangan; (d) politik, hukum dan pemerintahan; (e) etika, agama; (f) pengetahuan teknologi.”

Tetapi apabila Civics itu sebagai bagian dari isi ilmu politik, yaitu bagian dari demokrasi politiknya, maka isi atau materi dari demokrasi politik menurut Mariam D Irish *dalam* Soemantri (1976:24-25) meliputi : a) konteks ide demokrasi; b) konstitusi negara; c) inputs dan sistem politik; d) partai politik dan pressure group; e) pemilihan umum; f) lembaga –lembaga pengambil kebijakan; g) presiden sebagai kepala negara/ administrasi negara; h) lembaga yudikatif; i) output dari sistem demokrasi politik; j) kemakmuran umum dan ketahanan negara; k) perubahan sosial dan demokrasi politik.

Cara paling strategis untuk “ mengalami demokrasi” dan menjadi *civilized* adalah melalui “pendidikan kewargaan”. Di dalam pendidikan kewargaan terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi sebaliknya, harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan” (Cipto at al , 2002:i).

Pada prinsipnya, bahwa metode pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan dua variabel: orientasi aktivitas dan orientasi sasaran penyampaian, ke dalam empat spektrum. *Spektrum* pertama adalah kelompok metode pembelajaran di mana dosen menentukan orientasi kegiatan mahasiswa secara individual dan orientasi penyampaian difokuskan pada individu mahasiswa, misalnya metode pembelajaran dengan komputer. *Spektrum* kedua, kelompok pembelajaran di mana dosen menentukan orientasi aktivitas interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang lain dan fokus penyampaiannya adalah individu. Misalnya *competitive learning*. *Spektrum* ketiga, kelompok pembelajaran di mana dosen telah menentukan orientasi aktivitas mahasiswa secara individual dan orientasi penyampaiannya terfokus kepada mahasiswa sebagai kelompok. Misalnya ceramah. *Spektrum* keempat, kelompok metode pembelajaran di mana dosen menentukan orientasi aktivitas mahasiswa dalam berinteraksi dengan mahasiswa lain, dan orientasi penyampaiannya adalah kelompok mahasiswa. Misalnya *collaborative learning* (Zamroni, 2005:VII).

ICCE UIN Jakarta mengembangkan model pembelajaran PKn (CE) berpijak pada pendekatan pembelajaran aktif, transformatif dan demokratis. Pendekatan ini dioperasionalkan dengan memberikan penekanan yang seimbang kepada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Atas dasar itu pembelajaran CE dijalankan dengan Active Learning dan dievaluasi melalui berbagai model instrument. Instrumen tes untuk evaluasi kognitif, instrumen skala sikap untuk afektif dan portofolio untuk mengukur pengalaman dan perilaku. Strategi dan model ini mensyaratkan terintegrasinya kemampuan kognitif mahasiswa tentang materi-materi yang diajarkan dalam buku PKn serta kemampuan aplikatif dalam merespon kondisi atau peristiwa yang berkaitan dengan CE. Penilaian portofolio terdiri dari

tiga aspek, yaitu : tugas terstruktur , aktivitas luar kampus dan anekdot record. Dengan demikian penilaian dosen terhadap kemampuan mahasiswa tidak hanya didasarkan pada penguasaan materi semata, tetapi juga didukung oleh bagaimana sikap dan aktivitas mahasiswa tersebut dalam mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam materi. Tujuannya adalah agar pembelajaran CE dapat lebih “hidup” dan sinergis dengan realitas, bukan menjadikan mahasiswa jauh dari realitas (Rosyada, 2003a:9).

Indonesia baru yang demokratis adalah tujuan kita bersama. Mewujudkan cita-cita tersebut adalah tanggungjawab seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Ada beberapa faktor yang mendorong disoalisasikannya dan diajarkannya civic education di perguruan tinggi, yaitu : *pertama*, kuatnya kecenderungan *political illiteracy* dan apatisisme politik di kalangan masyarakat. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan jika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, padahal mereka merupakan kelompok yang terdidik dan diharapkan sebagai agen pembaharuan sosial. *Kedua*, secara intrisik, civic education mengandung dan mengajarkan nilai-nilai fundamental demokrasi yang sangat diperlukan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, transisi demokrasi Indonesia harus dikawal dengan langkah-langkah taktis dan sistematis yang bertumpu pada visi demokrasi agar transisi berujung pada lahirnya Indonesia yang demokratis, bukan sebaliknya kembali pada otoritarian (Rosyada, 2003a :8).

Pelaksanaan PKN dalam mengembangkan diri peserta didik, pada dewasa ini menghadapi berbagai problem dan sekaligus tantangan, antara lain, dalam wujud : 1) terdapat kecenderungan kuat di masyarakat golput meningkat; 2) kepercayaan pada pejabat politik rendah, atau bahkan sebagian masyarakat tidak percaya lagi ; 3) rendahnya atau sebaliknya kemauan politik yang berlebihan generasi baru untuk mengambil peran kepemimpinan politik sekarang ini juga ; 4) terdapat bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat; 5) terdapat banyak tindakan kekerasan di kalangan generasi baru (Zamroni, 2003a: 11).

Partisipasi generasi baru dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain : 1) memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat; 2) memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka; 3) memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi dan fungsi-fungsi lembaga yang ada, isu-isu yang penting, dan cara-cara berpartisipasi yang efektif; 4) memiliki keseimbangan antara *trust* dan *skeptis* atas kehidupan politik yang ada, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap dan tindakan tidak asal ikut atau sebaliknya tidak asal berbeda, melainkan partisipasi yang rasional; 5) memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan; 6) memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi; 7) memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok; 8) memiliki

kemampuan untuk bekerja sama dan bernegosiasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain; 9) memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan; 10) memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk dapat berbuat kebaikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, termasuk memiliki keyakinan bahwa institusi yang ada harus memberi respon yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat (Zamroni, 2003c: 11).

Kualitas dan kemampuan yang dikemukakan di atas tidak bersifat alamiah, akan muncul dengan sendirinya dalam diri warga generasi baru, melainkan merupakan hasil suatu rekayasa sosial dalam wujud PKn. Untuk melahirkan kemampuan tersebut, maka PKn harus dapat memberikan pengalaman kepada generasi baru sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, antara lain : 1) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk melakukan kontak dengan organisasi yang memperlakukan mereka dengan penuh respek dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya; 2) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk merefleksikan tentang makna pengalaman yang diperoleh dalam bermasyarakat untuk menunjukkan identitasnya, pribadi dan politiknya; 3) mendidik generasi baru untuk kontak dengan media massa, dengan mendorong mereka untuk membaca dan mengamati selaku konsumen yang kritis; 4) memberikan kesempatan kepada generasi baru untuk mengkomunikasikan pandangan-pandangan politiknya dan ekspresi budaya kelompoknya kepada kelompok yang lebih luas secara konstruktif; 5) mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal yang dapat memberikan pengalaman hidup dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Berarti PKn harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermakna sehingga setiap peserta didik : a) memiliki pengetahuan tentang sistem politik ekonomi, b) memahami dan menyadari nilai-nilai masyarakat demokratis, c) mampu mendiskusikan isu-isu yang kontroversial, d) mampu menemukan secara personal model-model yang dapat dijadikan teladan, dan e) memahami kontribusi-kontribusi organisasi-organisasi dalam masyarakat madani, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok advokasi, serta f) memiliki *self efficacy* yang positif dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menghadapi kondisi semacam ini, berbagai kebijakan, dukungan dan upaya khusus diperlukan untuk keberhasilan PKn, antara lain dalam bentuk; 1) pesan-pesan kultural yang dilaksanakan secara terus-menerus dan intens, yang berisi pesan-pesan toleransi, kebersamaan, kejujuran, anti kekerasan dan sebagainya dari para individu atau kelompok yang masih dihormati oleh masyarakat luas, khususnya bagi kalangan generasi baru; 2) kesempatan yang bagi generasi baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat; 3) kebijakan yang memfasilitasi transisi generasi baru dari masa remaja ke masa dewasa (Zamroni, 2003 c: 11).

Direktur Jenederal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui keputusannya Nomor:43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, menekankan bahwa metodologi pembelajaran kelompok matakuliah Pengembangan Kepribadian:

1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat. anggota keluarga, masyarakat dan warganegara.
2. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.
3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler.
4. Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global.

Pada era reformasi dewasa ini yang diperlukan adalah *Campus Based Civic Education*. *Civic education* yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa guna mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang demokratis diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kampus. *Campus based civic education* tersebut memiliki tiga pilar : a) anti kekerasan, b) konstitusional, c) memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, *Campus Based civic education* akan memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memberikan perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan bangsa, dan demokrasi.
2. Mendiskusikan peristiwa-peristiwa baik yang bersifat lokal nasional maupun internasional secara bebas dan terbuka.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan riil masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam civic education di kampus.
5. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan, dan

6. Memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan.”

Model *Campus based civic education* akan menjadi *civic education* tidak lagi hanya bersifat aktivitas perkuliahan semata, melainkan sudah bersinergi dengan kegiatan yang ada pada lembaga kemahasiswaan dan pengabdian pada masyarakat. Program civic education di Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya dikembangkan dalam tiga ranah aktivitas kampus, yaitu : (1) ranah pengajaran, yaitu penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (atau matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme; (2) ranah pengabdian masyarakat, yaitu penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik yang dilakukan secara kelembagaan (*officially*), seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun yang dilakukan di luar aktivitas kelembagaan seperti pengajian dan bakti sosial; (3) ranah kemahasiswaan, yaitu penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti pengembangan model *student goverment* dan penguatan etos kewirausahaan (*enterpreneurship*) (Zamroni, 2003:xi-xii).

1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah) telah mengadakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia, antara lain :

- a. Pelatihan *Stakeholders* untuk dosen Pendidikan Kewarganegaraan.perguruan tinggi Muhammadiyah se Indonesia
- b. Pengembangan *Civic Education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia.
- c. Menerbitkan buku “*Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*”, bekerja sama dengan *The Asia Foundation* dan Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- d. Menerbitkan Buku Metode Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Studi Pendahuluan yang Sudah Dilaksanakan

Studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan adalah mengadakan penelitian yang terkait dengan rencana penelitian ini, yakni:

- a. Penerapan Metode Diskusi untuk meningkatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
- b. Efektifitas Implementasi Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portafolio.
- c. Pengembangan Model Pembelajaran berbasis Portofolio pada Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi Mahasiswa.
- d. Pengaruh Proses Pembelajaran PKn terhadap Pengembangan nilai-nilai Demokrasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Jawa Tengah.
- e. Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Portofolio pada Mata Kuliah PKn untuk Mengembangkan Nilai-nilai Kewarganegaraan Mahasiswa

3. Hipótesis

Berdasarkan uraian di atas, hipótesis yang dirumuskan adalah :

- a. Ada perbedaan yang signifikan antara sikap demokratis mahasiswa sebelum dan setelah mendapatkan matakuliah PKn
- b. Ada hubungan yang signifikan antara tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn dengan sikap demokratis mahasiswa setelah memperoleh matakuliah PKn
- c. Untuk mewujudkan *campus based civic education*, diperlukan suasana kampus yang demokratis sejak awal kegiatan mahasiswa, proses pembelajaran, termasuk kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler, kuliah kerja nyata dan semua kegiatan kemahasiswaan.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Memperoleh materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat.
2. Memperoleh model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat
3. Mewujudkan pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang demokratis;
4. Mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan mahasiswa;
5. Terwujudnya embrio *campus based civic education*;
6. Terwujudnya embrio kampus sebagai laboratorium demokrasi, dan
7. Menganalisis hubungan antara model pembelajaran PKn dengan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan mahasiswa,

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif Metode penelitian yang digunakan adalah survey, pada mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah, yang meliputi proses pembelajaran PKn, pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan mahasiswa, pengembangan kampus sebagai laboratorium demokrasi dan pengembangan *campus based civic education*.

2. Tempat dan waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah. Dipilihnya wilayah Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah terdapat Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang cukup banyak dan representatif, yakni terdapat 14 perguruan tinggi Muhammadiyah. Keadaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah seperti tabel di bawah ini

Tabel 3. 1. Keadaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah

| No | Nama Perguruan Tinggi Muhammadiyah |
|----|---|
| 1 | Akademi Analisis Kesehatan Semarang |
| 2 | Akademi Keperawatan 'Aisyiyah Surakarta |
| 3 | Akademi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 4 | Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pekajangan |
| 5 | Akademi Keperawatan Muhammadiyah Semarang |
| 6 | Politeknik Muhammadiyah Karanganyar |
| 7 | Politeknik Muhammadiyah Magelang |
| 8 | Staim Muhammadiyah (STIM) Klaten |
| 9 | STIE Muhammadiyah Cilacap |
| 10 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
| 11 | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
| 12 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 13 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
| 14 | Universitas Muhammadiyah Semarang |

Sumber: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004: 1x-x)

Alasan lain dipilihnya perguruan tinggi Muhammadiyah, karena pada saat ini Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengembangkan *Civic Education* atau Pendidikan Kewarganegaraan di seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah se- Indonesia.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kompetensi tahap ke-2, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010 sampai dengan Nopember 2010.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa universitas Muhammadiyah di Jawa Tengah yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun akademik 2009-2010, yang terdiri dari 14 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa tengah.

Teknik penegambilan sampel dilaksanakan dengan cara kuota area random sampling. Dari 14 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah diambil empat perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai sampel berdasarkan area, yaitu berdasarkan eks karesidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Kedu, Semarang dan

Banyumas. Sehingga sebagai sampel epenelitian adalah seluruh dosen PKn dan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah PKn pada tahun akademik 2009-2010, yang meliputi perguruan tinggi: (1) Universitas Muhammadiyah Surakarta; (2) Universitas Muhammadiyah Semarang; Universitas Muhammadiyah Purworejo; (4) Universitas Muhammadiyah Magelang; dan (5) Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Sebagai informan pada penelitian ini, di samping dosen-dosen PKn ke-14 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah, juga beberapa Rektor dan Pembantu Rektor III di PTM. Dipilihnya Rektor, karena yang paling bertanggung jawab dan paling mengetahui tentang PTM yang dikelolanya. Sedangkan PR III yang membidangi kemahasiswaan, sehingga dianggap yang paling tahu tentang mahasiswa di PTM di mana ia bertugas. Sebagai gambaran informan pada penelitian ini, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.2. Keadaan Informen Penelitian

| No | Nama | Kedudukan dan Asal PTM |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H. MH. | Rektor UM Purwokerto |
| 2. | Drs. Banani Ma'mur, M.Si. | PR III/Dosen PKn UM Purwokerto |
| 3. | Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si. | Dosen PKn UM Surakarta |
| 4. | Drs. Ahmad Mutholi'in, M.Si. | Desen PKn UM Surakarta |
| 5. | Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si. | Dosen PKn UM Surakarta |
| 6. | Drs. H. Sutomo, M.Si | Dosen PKn UM Purwokerto |
| 7. | Agus Budi Santosa, S.H. | Dosen PKn UM Purworejo |
| 8 | Eko Priyanto, S.Pd. | Dosen PKn UM Purwokerto |

4. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran PKn, yang indikatornya meliputi : (a) manfaat pembelajaran Pkn; (b) antusias pengajar; (c) hubungan individual pengajar dengan mahasiswa; (d) pengelolaan kelas; (e) luas cakupan materi; (f) interaksi antar kelompok; (g) penugasan/bacaan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap demokratis mahasiswa yang indikatornya meliputi: (a) kebebasan menyatakan pendapat; (b) kebebasan berkelompok; (c) kebebasan berpartisipasi ; (d) kesetaraan antarwarga; (e) rasa percaya; (f) dan kerja sama.

5. Pengembangan Instrumen Penelitian

a. Validitas

Mutu penelitian terutama dinilai dari validitas hasil yang diperoleh. Validitas penelitian diklasifikasikan menjadi validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan keyakinan peneliti tentang kesahihan hasil penelitian, sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan tingkat generalisasi hasil penelitian yang diperoleh. Validitas hasil penelitian berada pada suatu garis kontinum yang terbentang dari mulai yang sangat tidak valid sampai dengan yang sangat valid (Furqon, 1997).

Menurut pendapat Arikunto (1998), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Menurut Sudjana (2001), validitas dapat dibedakan antara (a) validitas isi, (b) validitas bangun pengertian, (c) validitas ramalan dan (d) validitas kesamaan. Dua validitas pertama, yaitu validitas isi dan bangun pengertian, dapat dibuat melalui upaya penyusunan tes tanpa harus dilakukan pengujian statistika. Sedangkan untuk validitas kesamaan dan validitas ramalan dilakukan pengujian statistika melalui uji korelasi.

Ada dua jenis korelasi yang biasa digunakan, yakni korelasi momen produk (product moment) atau metode Pearson yang diberi notasi " r_{xy} " dan korelasi tata jenjang (rank correlation) atau metode Spearmen yang diberi notasi " ρ ".

Untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan korelasi product moment atau metode Pearson, dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Arikunto, 1998)

di mana :

| | |
|-----------|---|
| r_{xy} | = koefisien korelasi antara x dan y |
| N | = jumlah subjek |
| $\sum xy$ | = jumlah perkalian antara skor x dan skor y |
| x | = jumlah total skor x |
| y | = jumlah skor y |

x^2 = jumlah dari kuadrat x

y^2 = jumlah dari kuadrat y

Menurut Ali (1985), hasil penghitungan berupa koefisien korelasi dapat menggambarkan derajat “ketepatan” atau derajat validitas suatu alat test, yang menurut ketentuan berkisar antara 0,00 s.d +1,00 ($0,00 \leq K \leq +1,00$ di mana K adalah koefisien korelasi). Untuk menafsirkan tinggi rendahnya validitas dan koefisien korelasi, digunakan pedoman sebagai berikut :

0,00 s.d. 0,20 : Hampir tidak ada korelasi (alat tes tidak valid)

0,21 s.d. 0,40 : Korelasi rendah (validitas rendah)

0,41 s.d. 0,60 : Korelasi sedang (validitas sedang)

0,61 s.d. 0,80 : Korelasi tinggi (validitas tinggi)

0,81 s.d. 1.00 : Korelasi sempurna (validitas sempurna)

b. Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali pun diambil, akan tetap sama. Reliabilitas menunjuk pada suatu tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 1998).

Sedangkan menurut Sudjana (2001), reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapan pun alat penilaian tersebut akan digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.

Khusus dalam rangka menentukan apakah tes hasil belajar bentuk uraian yang disusun oleh seorang staf pengajar telah memiliki daya keajegan mengukur atau reliabilitas yang tinggi atukah belum, menurut Sudjono (2001), ada umumnya orang menggunakan sebuah rumus yang dikenal dengan nama Rumus Alpha. Adapun rumus alpha yang dimaksud adalah :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

di mana :

r_{11} = Koefisien reliabilitas tes

n = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes

1 = bilangan konstan

$$\sum S_i^2 = \text{Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item}$$

$$S_t^2 = \text{Varian total}$$

6. Metode Pengumpulan Data

a. Skala Sikap/Opinioner

Teknik menggali informasi yang berusaha mengukur sikap atau keyakinan individu, disebut skala pendapat (opinioner) atau skala sikap (Best, 1977:191-192). Dalam penelitian ini digunakan item-item berskala, berupa skala sikap, yaitu skala Likert. Skala Likert meminta kepada responden sebagai individu untuk menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), tak bisa memutuskan (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Masing-masing jawaban dikaitkan dengan angka atau nilai, misalnya SS = 5, S = 4, N = 3, TS = 2, dan STS = 1 bagi suatu pernyataan yang mendukung sikap positif dan nilai-nilai sebaliknya yaitu SS = 1, S = 2, N = 3, TS = 4 dan STS = 5 bagi pernyataan yang mendukung sikap negative (Ruseffendi dan Ahmad Sanusi, 1994 : 120).

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Muller (t.t. : 13) :

"In scoring positively stated Likerts "strongly agree" receives 5 point, "agree" 4 point, and so on. For negatively worded items the scoring is reversed ("strongly agree" equals 1, "agree" equals 2 and so on)".

Penskoran skala sikap diperkuat oleh pendapat Best (1997: 197) yang disesuaikan dengan jawaban responden. Misalnya skala sikap yang berskala bertingkat yang positif untuk jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5; S (Setuju) diberi skor 4; TB (Tidak Berpendapat) diberi skor 3; TS (Tidak Setuju) diberi skor 2; dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1. Sedangkan untuk skala sikap skala bertingkat yang negatif penskorannya adalah kebalikannya. Responden yang menjawab SS (Sangat Setuju) diberi skor 1; S (Setuju) diberi skor 2; TB (Tidak Berpendapat) diberi skor 3; TS (Tidak Setuju) diberi skor 4; dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 5. Sedangkan Edwards (1957:151) berpendapat :

"For favorable statements, the strongly agree response will be given a weight of 4, the agree response a weight of 3, the undecided response a weight of 2, the disagree response a weight of 1, and the strongly disagree response a weight of 0".

Penskoran skala sikap dalam penelitian ini merujuk pendapat Edwards, yaitu untuk skala sikap bertingkat yang positif untuk jawaban SS (Sangat Setuju), diberi skor 4; S (Setuju) diberi skor 3; TB (Tidak Berpendapat) diberi skor 2; TS (Tidak Setuju) diberi skor 1; dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 0. Dan sebaliknya, untuk skala sikap bertingkat yang negative untuk jawaban SS (Sangat

Setuju) diberi skor 0; S (Setuju) diberi skor 1; TB (Tidak Berpendapat) diberi skor 2; TS (Tidak Setuju) diberi skor 3; dan STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 4.

Pensekoran skala sikap bertingkat yang positif jawaban SL (Selalu) diberi skor 4; SR (Sering) diberi skor 3; KD (Kadang-kadang) diberi skor 2; JR (Jarang) diberi skor 1; dan TP (Tidak Pernah) diberi skor 0. Sebaliknya skala sikap bertingkat yang negative jawaban SL (Selalu) diberi skor 0; SR (Sering) diberi skor 1; KD (Kadang-kadang) diberi skor 2; JR (Jarang) diberi skor 3; dan TP (Tidak Pernah) diberi skor 4.

Opinioner dalam penelitian ini untuk mengungkap dan memperoleh data tentang model pengembangan pembelajaran PKn dan pengembangan nilai-nilai demokrasi mahasiswa.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan (Nurkencana dan Sumartana, 1986:46).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Surakhmad, 1994:162).

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar (Sudjana, 2001:84).

Masalah pokok dalam pengamatan perilaku menurut Kerlinger (1986: 858) adalah si pengamat sendiri. Maksudnya pengamat itu merupakan kekuatan penentu dan sekaligus kelemahan penentu pula. Pengamat harus mencerna informasi yang didapat dari observasi dan kemudian membuat inferensi mengenai konstruk-konstruk.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur atau menilai pengembangan nilai-nilai demokrasi mahasiswa selama di kampus. Sebelum melakukan observasi, peneliti menyiapkan terlebih dahulu pedoman observasi, yang berisi dari penjabaran dari nilai-nilai demokrasi mahasiswa, yang sebelumnya dibuat dalam sebuah kisi-kisi.

Bentuk pedoman observasi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pedoman yang berstruktur (memakai kemungkinan jawaban) dan telah ditetapkan indikator-indikator dari setiap jawaban sebagai pegangan pengamat waktu melakukan observasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1998:234), bahwa dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Observasi sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, bukan observasi sambilan atau secara kebetulan, dan diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya sehingga dalam penelitian ini observasi dilakukan beberapa kali, sampai memperoleh data yang meyakinkan.

Peneliti dalam penelitian ini menyediakan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen, yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Di samping mencatat, peneliti juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.

Arikunto (1998:234) juga mengemukakan, bahwa dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Oleh karena itu, dalam observasi ini peneliti juga menyediakan blangko pengamatan sebagai instrumen penelitian.

Pada observasi eksperimental di mana tingkah laku yang diharapkan muncul karena peserta didik dikenai perlakuan (*treatment*) atau suatu kondisi tertentu, maka observasi memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang, sedangkan observasi yang dilaksanakan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh lebih sederhana, karena observasi semacam ini dapat dilakukan sepiantas lalu saja (Sudijono, 2001:77). Oleh karena itu sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti telah mempersiapkan dahulu blanko/lembar observasi yang berisi perilaku mahasiswa yang dapat diamati oleh peneliti, yang sebelumnya dirancang/disusun dalam sebuah kisi-kisi.

Guna memperlancar pekerjaan observer dalam melakukan tugas perekaman, peneliti mengembangkan pedoman observasi, yang berisi daftar perilaku yang menjadi target penelitian. Perilaku tersebut dideskripsikan sejelas mungkin sehingga observer mudah mengenalinya saat melakukan observasi, dan selanjutnya merekamnya sesuai dengan prosedur yang telah dipilih. Sehingga tugas observer tinggal memberikan tanda cek di sebelah daftar perilaku yang menunjukkan perilaku telah terjadi.

Penelitian ini akan melibatkan sejumlah mahasiswa, terutama dalam pengamatan.. Satu orang observer diharapkan rata-rata mengobservasi tujuh responden. Para observer ini sebelumnya diberikan pelatihan oleh peneliti terutama bagaimana cara kerja mereka. Para observer ini melaksanakan pengamatan tidak secara terus-menerus selama perkuliahan satu semester, tetapi menggunakan sampling waktu, dengan memilih periode rentang waktu. Masing-masing observer mengadakan pengamatan sebanyak tiga kali.

Data yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini melalui observasi adalah pengembangan nilai-nilai mahasiswa. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa ketika mereka berada di kampus, terutama pada saat mereka mengikuti proses belajar mengajar PKn. Penskoran observasi

berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada diri mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut : SL : Selalu diberi skor 4; SR : Sering diberi skor 3; KD : Kadang-kadang diberi skor 2; JR : Jarang diberi skor 1; dan TP : Tidak pernah diberi skor 0.

Pada saat awal dan pada akhir pengembangan model pembelajaran PKn, dilakukan observasi terhadap responden , guna mengetahui sejauh mana pengembangan nilai-nilai demokratis mahasiswa selama mengikuti kuliah PKn.

c. Wawancara

Wawancara terutama dilakukan dengan dosen-dosen PKn terutama untuk memperoleh data-data yang meliputi tiga ranah aktivitas kampus, yang meliputi tiga ranah :

Pertama ranah pengajaran, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme. Proses pembelajaran hendaknya diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Terutama model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang bagaimanakah yang diterapkan pada matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Kedua : Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Ketiga : Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler. Apa saja yang dilakukan sebagai bentuk aktivitas pembelajaran studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil dan kegiatan kokurikuler.

Keempat: Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global.

Kelima ranah pengabdian masyarakat, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik yang dilakukan secara kelembagaan (*officially*), seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun yang dilakukan di luar aktivitas kelembagaan seperti pengajian dan bakti sosial.

Keenam ranah kemahasiswaan, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti pengembangan model *student goverment* dan penguatan etos kewirausahaan (*enterpreneurship*).

Model *Campus based civic education* akan menjadikan *civic education*/PKn tidak lagi hanya bersifat aktivitas perkuliahan semata, melainkan sudah bersinergi dengan kegiatan yang ada pada lembaga kemahasiswaan dan pengabdian pada masyarakat. Menurut Diktilitbang PP Muhammadiyah, program *civic education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya dikembangkan dalam tiga ranah aktivitas kampus, yaitu :

Pertama ranah pengajaran, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme. Dalam hal ini prakteknya bagaimana.

Kedua ranah pengabdian masyarakat, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik yang dilakukan secara kelembagaan (*officially*), seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun yang dilakukan di luar aktivitas kelembagaan seperti pengajian dan bakti sosial. Bagaimana realisasasi pelaksanaannya selama ini di kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Ketiga ranah kemahasiswaan, yakni penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti pengembangan model *student goverment* dan penguatan etos kewirausahaan (*enterpreneurship*). Bagaimana pandangan para dosen PKn, dan bagaimana pula realisasi pelaksanaannya selama ini di kampus perguruan tinggi Muhammadiyah.

Menurut Zamroni (Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah), bahwa *Campus Based Civic education* yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa guna mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang demokratis diorganisir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kampus. *Campus based civic education* tersebut memiliki tiga pilar : a) anti kekerasan, b) konstitusional, c) memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat. bagaimana pelaksanaan realisasi ketiga pilar tersebut di kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan bagaimana pula dampaknya terhadap kehidupan di kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

d. Studi Dokumenter

Studi dokumenter yang merupakan metode pengumpulan data pelengkap, untuk meperoleh data berupa kurikulum PKn, aturan-aturan yang ada kaitannya dengan PKn, sumber-sumber pembelajaran PKn, aspek-aspek perencanaan yang disusun oleh para dosen PKn.

7. Analisis Data

Sebelum data dianalisis dilakukan langkah-langkah uji persyaratan analalisis data. Setelah dilakukan uji persyaratan kemudian dilakukan analisis data sebagai berikut:

- Data tentang pengembangan model pembelajaran yang berupa hasil penelitian pendahuluan dianalisis dengan teknik analisis *perofit*,
- Hasil pengembangan model yang berupa observasi kelas dan hasil penelitian uji validasi dianalisis dengan analisis kualitatif;
- hasil uji coba dianalisis dengan uji t;

$$t = \frac{C}{\sqrt{\frac{2MS_w}{n}}}$$

(Furqon, 1997:198)

- Data hubungan proses pembelajaran PKn dengan pengembangan nilai-nilai demokratis mahasiswa dianalisis dengan korelasi product moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Arikunto, 1998)

di mana :

r_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y

N = jumlah subjek

$\sum xy$ = jumlah perkalian antara skor x dan skor y

$\sum x$ = jumlah total skor x

$\sum y$ = jumlah skor y

$\sum x^2$ = jumlah dari kuadrat x

$\sum y^2$ = jumlah dari kuadrat y

Nilai koefisien korelasi dikenal sebagai hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variable yang diteliti. Nilai koefisien korelasi __ sebagaimana juga taraf signifikansi __ digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dalam satu penelitian. Nilai koefisien bergerak dari $0 \geq 1$ atau $1 \leq 0$ (Bungin, 2010:184).

Untuk mengetahui korelasi antara peengembangan sikap demokrasi mahasiswa setelah memperoleh pembelajarn PKn (Y) dengan proses pembelajaran PKn (Z), setelah diperoleh koefisien korelasi (r), berikutnya dikonsultasikan dengan table di bawah ini.

Tabel 3.3. Tabel Nilai Koefisien

| Nilai Koefisien | Penjelasan |
|---------------------|-----------------------------------|
| + 0,70 ___ ke atas | Hubungan positif yang sangat kuat |
| + 0,50 ___ + 0,69 | Hubungan positif yang mantap |
| + 0,30 ___ + 0,49 | Hubungan positif yang sedang |
| + 0,10 ___ + 0,29 | Hubungan positif yang tak berarti |
| 0,0 | Tidak ada hubungan |
| - 0,01 ___ - 0,09 | Hubungan negatif tak berarti |
| - 0,10 ___ - 0,29 | Hubungan negatif yang rendah |
| - 0,30 ___ - 0,49 | Hubungan yang sedang |
| -0,50 ___ - 0,59 | Hubungan negatif yang mantap |
| -0,70 ___ - ke atas | Hubungan negatif yang sangat kuat |

Adaptasi: Bungin, 2010: 184

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembelajaran PKn

- a) Pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara

Proses pembelajaran PKn di Universitas Muhammadiyah Surakarta selama ini senantiasa menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Di samping itu dalam pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maksudnya suasana dan strategi bisa berbeda, pembelajaran dapat dilaksanakan menggunakan strategi lain, misalnya pada jam-jam siang (12.30 ke atas). Tetapi ini bukan berarti tidak mempunyai pegangan, tetapi menyesuaikan kondisi agar pembelajaran tetap menarik mahasiswa (Yulianto, wawancara 16 April 2010).

Menurut Mutholi'in (wawancara (16 April 2009), beliau sebenarnya mempunyai obsesi pembelajaran aktif, tetapi tidak setiap kali tatap muka dengan mahasiswa dapat dilakukan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif baru dapat dilakukan 60% dari tatap muka yang rata-rata per semester 14 tatap muka. Kendala yang dialami antara lain karena kelas yang terlalu besar. Oleh karena itu yang dilakukan dengan melaksanakan kombinasi pembelajaran aktif dan berupaya merangsang mahasiswa untuk ikut berpartisipasi.

Solusi yang ditempuh dalam rangka memecahkan masalah/kendala tersebut di atas adalah mahasiswa diberi tugas untuk mencari informasi atau mengakses data dalam internet tentang masalah-masalah sosial aktual atau

masalah-masalah sosial yang sedang berkembang dalam masyarakat yang membutuhkan jalan pemecahannya, sehingga membutuhkan kerjasama dan keterlibatan antara pemerintah dengan semua komponen yang ada dalam masyarakat termasuk mahasiswa (Agus Budi Santoso, wawancara, 5-8-2010).

b) Pembelajaran merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat.

Idealnya pembelajaran PKn merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat, terbentuknya sikap mahasiswa. Namun kenyataan pada umumnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pasif. Hal ini terjadi karena PKn bukan merupakan matakuliah keahlian, sehingga dianggap remeh oleh mahasiswa. Bahkan ada kesan mereka kuliah hanya sekedar memenuhi kewajiban 75 % kehadiran. Jika tidak ada batas minimum 75 % kehadiran tidak boleh ikut ujian, mungkin lebih parah lagi. Buktinya kalau diberi kesempatan untuk bertanya, jarang yang bertanya. Celaknya mereka hadir hanya untuk memenuhi kewajiban 75 % tersebut (Mutholi'in, wawancara 16 April 2010).

Menurut Yulianto (wawancara 16 April 2010) untuk menumbuhkan daya kritis mahasiswa dengan cara melontarkan suatu kasus tertentu berdasarkan perspektif politik tertentu misalnya. Upaya ini dapat dilakukan dengan (1) memunculkan banyak gagasan yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat mahasiswa; (2) secara teknis dibentuk kelompok-kelompok kecil mahasiswa 4-5 orang untuk menanggapi kasus-kasus yang muncul; (3) pada akhir kuliah diberikan berikan klarifikasi. Dengan metode seperti ini akan menumbuhkan daya kritis mahasiswa, karena dosen tidak mendikte mahasiswa.

Untuk menumbuhkan daya kritis mahasiswa, Muhibbin (wawancara, 16 April 2010) proses pembelajaran yang dipakai adalah strategi debat, dengan adu argumen terhadap tema-tema yang aktual. Mahasiswa agar memilih statement setuju atau tidak setuju terhadap suatu kasus tertentu, Sehingga mahasiswa terbagi menjadi dua kelompok. Dengan perwakilan 2-3 orang masing-masing kelompok untuk berdebat, sedang yang lainnya sebagai suppoter.

Pemberian tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas untuk membuat makalah, yaitu ada tugas pembuatan makalah individu dan ada tugas pembuatan makalah kelompok dengan tulisan tangan atau tidak diperbolehkan diketik komputer, hal tersebut dimaksudkan oleh dosen agar mahasiswa benar-benar memahami /mengerti tentang masalah-masalah sosial aktual yang dibahas dalam makalah yang dibuat (Agus Budi Santoso, wawancara, 5-8-2010).

c) Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, dan kegiatan kokurikuler.

Sebagai bentuk aktivitas pembelajaran, yakni (1) penugasan, berupa tugas meringkas buku sumber dengan cara ditulis tangan, untuk menghindari duplikasi; (2) mengunduh materi-materi aktual dari internet untuk dipahami dan diringkas, apa yang dapat diambil pelajaran dari materi tersebut dan direfleksikan apa yang dapat diterima oleh mahasiswa; (3) mengajak mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk membuat tugas yang materinya terkait dengan nasionalisme. Mahasiswa diajak mencari cerpen, novel, puisi atau film yang menurut mereka dapat menanamkan nasionalisme. Materi-materi tersebut kemudian diundi dan dipresentasikan. Dari presentasi tersebut pelajaran apa yang dapat diperoleh. (Mutholi'in, wawancara 16 April 2010)

Terutama berupa studi kasus yang disesuaikan dengan permasalahan. Dosen-dosen PKn mengambil standar aturan seperti aturan matakuliah tatap muka langsung minimal 12 kali. Tidak dilupakan adalah kualitas proses. Artinya selain memperhatikan model strategi pembelajaran juga sebagai assesmen. Sebagai contoh dengan adanya kasus "Tanjung Priok" 14 April 2010 dua hari yang lalu, mahasiswa supaya mencari data lewat media dan atau internet, apa sebab-sebabnya. Hasil pencarian mahasiswa didiskusikan. Kegiatan kokurikuler yang belum terjabarkan, agak sulit. Bagi dosen PKn dapat mendorong mahasiswa bahwa untuk menjadi warga negara yang baik tidak cukup hanya mengikuti kuliah tatap muka saja, tetapi lewat berbagai kegiatan (wawancara, Yulianto, 16 April 2010).

Bentuk aktivitas pembelajaran seperti studi kasus, . penugasan mandiri, tugas baca, seminar kecil, kegiatan kokurikuler, semuanya hampir dilaksanakan, kecuali seminar kecil yang belum. Tugas mandiri, tema sudah ditentukan dosen, misalnya kesadaran hukum, anti korupsi, kekerasan anak, dll. Mahasiswa agar membuat secara mandiri, berupa karya ilmiah antara 7- 10 halaman. Kegiatan kokurikulum pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah pada tingkat RT/RW tentang kesadaran hukum, kekerasan di rumah tangga, dan sebagainya (Muhibbin, wawancara, 16 April 2010).

Yang dilakukan oleh dosen PKn sebagai bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah:

- a. Studi kasus, yaitu ditujukan agar mahasiswa mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan masalah-masalah sosial aktual untuk dicari akar permasalahan yang kemudian untuk dicari alternatif-alternatif pemecahan (solusinya).
- b. Penugasan mandiri, yaitu ditujukan untuk menumbuhkan jiwa kemandirian mahasiswa, seperti jiwa kewirausahaan (enterpreneurship). Di kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo terkait dengan penugasan mandiri contohnya pembahasan materi tentang Ekonomi Kerakyatan maka mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan koperasi mahasiswa (Kopma). Bagi mahasiswa yang akan mengambil bea siswa, maka tugas mandiri adalah membuat karya

ilmiah yang bisa bekerjasama dengan koperasi mahasiswa dalam rangka pengambilan data-data yang dapat mendukung bagi hasil karya ilmiahnya.

- c. Seminar kecil /diskusi yaitu mahasiswa diberi tugas untuk membentuk kelompok diskusi dan membuat makalah yang harus dipresentasikan. Makalah yang dibuat berdasarkan pembagian tema-tema dan tema-tema tersebut diambil/mengangkat masalah-masalah sosial yang sedang ramai diperbincangkan (aktual) dan membutuhkan adanya peran serta warga negara termasuk mahasiswa dalam rangka mencari pemecahannya (solusinya). Contoh : Kasus Ahmadiyah.

Tugas pembuatan makalah merupakan tugas kelompok yang harus dikerjakan dan kemudian dipresentasikan dihadapan teman-teman/kelompok lain (Agus Budi Santoso, wawancara, 5-8-2010).

d) Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global.

Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global, antara lain dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Di samping itu harus diingat bahwa eksistensi suatu bangsa berhasil tidaknya ditentukan berhasil tidaknya menanamkan kesadaran betapa pentingnya PKn dan lebih mendalami PKn. Apalagi pada era global, bangsa yang tidak berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis dalam masyarakat global, akan menjadi korban globalisasi itu sendiri. Gambarnya jelas sekali, semakin maju suatu negara, negara semakin intentsif untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung kepada warga negaranya (Yulianto, wawancara, 16 April 2010).

Yang dilakukan dalam proses pembelajaran PKn dalam rangka memotivasi dan menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran PKn merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksisi dalam masyarakat global, terutama dalam tugas akhir mahasiswa membuat tugas berupa paper yang temanya *membrigdown* materi PKn. Masing-masing tema disesuaikan dengan bidang studinya. Sejak mahasiswa menentukan judul hingga sistematikanya, mahasiswa harus konsultasi dengan dosen (Mutholi'in, wawancara, 16 April 2010).

Menurut Muhibbin (wawancara, 16 April 2010) dalam proses belajar mengajar dilaksanakan semacam diskusi dengan mengangkat tema-tema aktual. Karena yang diutamakan dalam diskusi PKn adalah tema-tema aktual. Tema aktual ini dapat diakses dari berbagai media. Idealnya bagaimana mahasiswa dapat memperoleh tema baru yang akan kita abahas, agar mahasiswa ikut bertanggung jawab dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dan sedang trend di media.

Upaya yang dilakukan dosen PKn di Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam rangka mendorong (memotivasi) dan menumbuhkan kesadaran mahasiswa

bahwa PKn merupakan kebutuhan hidup agar mahasiswa dapat eksis dalam kehidupan masyarakat global, adalah :

Proses pembelajaran PKn dengan menumbuhkan jiwa kemandirian dan jiwa kewirausahaan, yaitu dengan mengaktifkan organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan, maka mahasiswa diajak untuk mengkritisi persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia, seperti pendidikan yang diterapkan di Negara Republik Indonesia yang mengikuti standard negara barat. Ditinjau dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan untuk mewujudkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, akan tetapi kenyataannya (realitanya) adalah praktek kapitalisme yang dimunculkan di Indonesia, contohnya masalah siswa/peserta didik yang dituntut untuk penguasaan dalam berbahasa inggris. Kesan mahasiswa adalah mahasiswa masih menghadapi keterbatasan dalam rangka penyampaian aspirasi nya, yaitu penyampaian aspirasinya melalui IMM atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Permasalahan/persoalan yang lain yang diamati dan dikritisi oleh mahasiswa adalah masalah yang paling mendasar dalam kehidupan Bangsa Indonesia, yaitu masalah Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila) yang benar-benar belum menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan dari masalah ini akan muncul kasus-kasus/masalah-masalah, seperti :

1. Masalah lingkungan, yang menyangkut kelestarian lingkungan.

Lingkungan yang merupakan tempat bagi manusia dalam kehidupannya berperan penting dalam rangka kehidupan manusia, karena manusia hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam (biotik dan abiotik) maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam sebagai anugerah Allah Swt berperan besar dalam rangka penyediaan segala hal yang dibutuhkan manusia. Maka dari itu menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban bagi setiap warga negara termasuk mahasiswa. Namun dalam kenyataan (realitanya) yang ada di Purworejo, usaha penjagaan kelestarian lingkungan masih adanya kekurangan, seperti masalah penambangan pasir besi. Merupakan hal yang berlawanan/kontradiktif, bahwa di satu sisi Pemda Purworejo memacu diri agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperoleh hasil yang banyak dengan menggali sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki Purworejo, hal ini sebagai bentuk realisasi dari penerapan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang otonomi daerah. Dan di sisi yang lain penambangan pasir besi yang ada di purworejo kurang memperhatikan faktor kelestarian lingkungan yaitu lingkungan alamnya.

2. Masalah pertanian, yaitu masalah perhatian terhadap petani yang melakukan usaha pertanian tanaman organik yang memerlukan adanya perhatian. Karena hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani khususnya dan

pada akhirnya dapat mendukung terhadap pencapaian PAD Pemda Purworejo, serta dapat ikut andil dalam rangka usaha pelestarian lingkungan hidup dan usaha menjaga kesehatan manusia maupun masyarakat Purworejo. Karena pemupukan tanaman menggunakan pupuk organik dan pembrantasan hama tanaman menggunakan bahan-bahan alami bukan menggunakan bahan kimia yang rawan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia juga terhadap pencemaran lingkungan.

3. Masalah PNPM dalam hal yang seharusnya adalah masyarakat luas yang dapat memanfaatkannya atau menikmatinya sehingga sesuai dengan tujuan dari keberadaan PNPM yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun dalam kenyataan hanya elit-elit yang berperan dalam pemanfaatan PNPM, sehingga maksud dan tujuan dari PNPM belum dapat tercapai.

Dalam rangka usaha untuk menumbuhkan kesadaran hidup berdemokrasi maka mahasiswa masuk atau menjadi anggota organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan bernegara, sehingga cara menumbuhkan kesadaran hidup berdemokrasi dengan cara mempraktekan secara langsung bukan dengan cara diberi ceramah yang banyak oleh dosen tentang hidup berdemokrasi. Pembelajaran di luar kelas/di luar kampus hasilnya lebih efektif dibanding pembelajaran di dalam kelas/kampus, karena kesan formalitas hubungan antara dosen dengan mahasiswa tidak terlalu tampak dan tidak terdapat sekat secara jelas antara dosen dengan mahasiswa sehingga mahasiswa lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada dosen (Agus Budi Santoso, wawancara, 5-8-2010).

3). Model *Campus based civic education*

- a) **Ranah Pengajaran. Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme.**

Praktiknya penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme, agak sulit dilaksanakan, oleh karena itu perlu dibentuk sebuah forum untuk mensinergikan, karena masing-masing dosen masih jalan sendiri-sendiri. Memang dalam hal ini sudah ada beberapa dosen yang sudah memunculkan hal ini dengan mengadakan observasi tentang pelaksanaan demokrasi pada masyarakat sekitar (Mutholi'in, wawancara 16 April 2010)

Menurut Yulianto (wawancara, 16 April 2010) praktek penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan untuk menggantikan matakuliah Kewiraan (dengan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) yang selama ini banyak didominasi oleh doktrin militerisme di Universitas Muhammadiyah

Surakarta, ada beberapa hal perlu dikritisi. Seperti masih adanya kesan terhadap matakuliah PKn, siapa pun bisa mengampu. Hal ini jelas melanggar aturan dari Dirjendikti. Akibatnya implementasi perkuliahan di lapangan bias berbeda-beda.

Praktik penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan perkuliahan, di dalamnya ada mentoring pembinaan akhlak, cara-cara pergaulan, cara berbakaian, serta pelatihan-pelatihan yang terkait dengan *soft skill* (Muhibbin, wawancara, 16 April 2010).

Praktik Pembelajaran PKn yang telah dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang merupakan pengganti mata kuliah Kewiraan, adalah praktek militerisme sudah tidak dialami lagi oleh mahasiswa. Pembelajaran PKn dengan mengembangkan inovasi-inovasi karena tidak menanamkan doktrin-doktrin (indoktrinasi), akan tetapi dengan mengembangkan penalaran-penalaran terhadap nilai-nilai universal untuk memperluas pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi (Agus Budi Santoso, Wawancara, 5-8-2010).

b) Ranah Pengabdian pada Masyarakat.

Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik yang dilakukan secara kelembagaan (*officially*), seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun yang dilakukan di luar aktivitas kelembagaan seperti pengajian dan bakti sosial.

Realisasi pelaksanaan penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta sampai saat ini belum adanya pemahaman yang seragam terutama tentang pentingnya matakuliah PKn. Kalau di FKIP UMS sendiri konsisten PKn tiga SKS. Bahkan ada juga yang menyatakan tanpa PKn tidak apa-apa, sehingga PKn cukup dua SKS saja. Di samping itu tidak ada keseragaman penempatan PKn pada semester tertentu. Di FKIP pada semester III, sedang pada fakultas lain berbeda-beda. Problem-problem terutama dalam ranah pembelajaran. KKN di UMS secara formal tidak ada. Lembaga Pengabdian pada masyarakat mengadakan KKN bagi mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan KKN. Kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) tidak banyak. Yang banyak melakukan adalah Senat Universitas dan perguruan tinggi untuk para dosen. Tetapi kegiatan itu belum secara jelas menyebarkan nilai-nilai PKn, bahkan terkesan terkotak-kotak (Yulianto, wawancara, 16 April 2010).

Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, baik yang dilakukan secara kelembagaan (*officially*), seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun yang dilakukan di luar aktivitas kelembagaan seperti pengajian dan bakti sosial, itu memang idealnya demikian, tetapi pelaksanaannya memang belum bisa, dan pelaksanaannya pun bukan atas nama PKn, tetapi dikemas dalam kegiatan kepramukaan yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa Program Studi PPKn (Mutholi'in, wawancara 16 April 2010).

Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakannya bakti sosial pada tingkat HMJ dan tingkat fakultas minimal setahun sekali. Sedangkan pada Program Studi PPKn diformatkan dalam kemah kepramukaan (Muhibbin, wawancara, 16 April 2010).

Realisasi pelaksanaan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo masih bersifat seremonial tidak merupakan program yang berkelanjutan. Jadi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akademik yang sudah ada bobot Sistem Kredit Semester (SKS). Kenyataan pelaksanaan KKN yang demikian karena terkendala oleh faktor waktu (Agus Budi Santoso, Wawancara, 5-8-2010).

c) Ranah kemahasiswaan,

Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti pengembangan model *student government* dan penguatan etos kewirausahaan (*enterpreneurship*).

Kegiatan *student government*, sudah sangat intensif dikembangkan, hanya saja belum dapat mewadahi kegiatan mahasiswa. Program Studi PPKn sudah mempunyai empat berupa toko kecil, untuk melatih mahasiswa. Kendala utama untuk pengembangan lebih lanjut adalah masalah waktu (Yulianto, wawancara, 16 April 2010).

Kegiatan berupa *student government* berupa dialog-dialog mengenai pembelajaran demokrasi, hanya memang pelaksanaannya selama ini belum merupakan intergrasi dengan PKn, jadi kegiatannya di luar PKn, berjalan sendiri-sendiri dan merupakan kegiatan kemahasiswaan, tetapi sudah dapat berjalan dengan baik (Mutholi'in, wawancara, 16 April 2010).

Kewirausahaan mahasiswa sudah ada, berupa program mahasiswa wirausaha. Program ini pernah mendapatkan suntikan dana dari Dirjendikti sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). Usahnya adalah membuat toko kecil di belakang kampus. Usaha lainnya membuat seragam mahasiswa jurusan. Selama ini peremajaan kepengurusan belum berkembang. Kegiatan lain berupa program 1 tahun . Program ini dimusyawarahkan dalam bentuk KAMA, yang berhasil membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antar organisasi kemahasiswaan. Organisasi ini semacam majelis mahasiswa. Organisasi ini membentuk PKM(Program Kreativitas mahasiswa) yang lebih banyak kegiatannya pada bidang pengabdian pada masyarakat. Program kreativitas mahasiswa lainnya berupa membuat sandal dari perca kain, kreativitas pandai besi, agar pisau bernilai seni, serta memanfaatkan kardos-kardos bekas (Muhibbin, wawancara, 16 April 2010)

Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, *student government* dikembangkan lewat organisasi kemahasiswaan yang sifatnya benar-benar otonomi tanpa adanya campur tangan universitas. Pelaksanaannya justru sangat demokratis. Sebagai contoh ketika pemilihan umum Presiden BEM, benar-benar menerapkan demokrasi. Ketika itu ada kelompok yang protes, merasa tidak puas

dengan hasil pemilu BEM. Kasusnya kemudian ditangani KPU, yang akhirnya semua kelompok dapat menerima keputusan KPU. Jadi jika ada permasalahan mahasiswa dapat menyelesaikan sendiri. Termasuk lembaga legislatif mahasiswa, juga sudah dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan keuangan mereka juga mendistribusikan sendiri. Organisasi kemahasiswaan, seperti BEM ada dari tingkat program studi sampai dengan tingkat universitas. Prestasi mereka selama ini dalam berorganisasi terjadi stabilitas yang dinamis, tidak ada konflik, stabilitas senantiasa dapat dijaga (Wawancara PR III, 11 Mei 2010).

Kewirausahaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dikembangkan melalui *carier development centre* (CDC). Lembaga ini di bawah PR III, bergerak dalam bidang penyiapan karir mahasiswa dan bidang kewirausahaan. Melalui berbagai pelatihan, pembuatan proposal kewirausahaan mahasiswa, tahun ini (2010) meloloskan lima proposal kewirausahaan dengan nilai total Rp 73.500.000,00. Kelima proposal yang dibiayai Dirjen dikti itu meliputi (1) pembesaran gurameh dengan ampas tahu sebagai umpan; (2) pemanfaatan limbah plastik untuk aneka kerajinan; (3) pembuatan pelet (makanan ikan) secara mandiri; (4) pembuatan CD multimedia; dan (5) usaha kantin di kampus.

Pengembangan kewirausahaan mahasiswa yang lain melalui koperasi mahasiswa dibentuk books store, yang bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Taspen, Telkom, di mana lembaga tersebut memberikan pinjaman lunak kepada koperasi mahasiswa, yang dikelola oleh mahasiswa secara langsung. Universitas bertindak sebagai pembina, yang bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan. Koperasi mahasiswa wajib memberikan laporan perkembangan setiap bulan kepada universitas. Di samping itu program kreativitas mahasiswa banyak yang lolos didanai oleh Dirjendikti (Wawancara dengan PR III Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 11 Mei 2010).

Realisasi pelaksanaan di Universitas Muhammadiyah Purworejo selama ini sudah cukup baik/cukup bagus, buktinya ada kegiatan kemahasiswaan, Contohnya Koperasi Mahasiswa (Kopma) yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, termasuk usaha membuka kantin mahasiswa (Agus Budi Santoso, Wawancara, 5-8-2010).

d) Pelaksanaan dan realisasi tiga pilar *Campus Based Civic education* : (a) anti kekerasan, (b) konstitusional, (c) memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat.

Pelaksanaan dan realisasi tiga pilar *Campus Based Civic education*, yang paling sulit bagi dosen menurut Yulianto (wawancara 16 April 2010) adalah dosen sudah berupaya untuk membentuk suatu yang ideal kepada mahasiswa, tetapi mahasiswa di luar kuliah/kampus mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diperoleh pada bangku kuliah. Sebagai contoh, kepada mahasiswa dosen telah memberikan keteladanan yang baik kepada mahasiswa, tetapi di luar mahasiswa mendapatkan keteladanan-keteladanan yang kurang baik, bahkan yang bertentangan.

Menurut PR III Universitas Muhammadiyah Purwokerto, realisasi pilar pertama *campus based civic education*, yakni anti kekerasan, dapat terwujud. Sudah lima tahun terakhir demonstrasi mahasiswa tidak ada lagi, karena mereka merasa aspirasinya dapat tersalurkan. Pilar Konstitusional, dengan menerapkan tatakrma mahasiswa, dan para mahasiswa pun taat asas (Banani Ma'mur, Wawancara, 11 Mei 2010).

Pelaksanaan dan realisasi pilar pertama *Campus Based Civic education* yakni anti kekerasan, menurut Rektor UM Purwokerto, bahwa kita tidak menghendaki di lingkungan kita adanya kekerasan. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan muhammadiyah ada harmonisasi antar wargasesama., antar pimpinan dengan segenap civitas akademika dapat berjalan tanpa adanya kekerasan fisik maupun psikis dan sikap. Semua berkembang secara bagus , karena masing-masing kita sesama warga dapat berjalan dengan baik. Yang ditempuh oleh banyak teman (dosen dan karyawan) sudah mengarah ke sini (anti kekerasan) walaupun belum sepenuhnya sebagaimana yang kita harapkan. Tidak dipungkiri bahwa di uM purwokerto ada priksi-priksi tertentu, tetapi tidak mencuat, yang salah satu bentuknya adalah adanya pemikiran yang berbeda. Untuk itu diperlukan usaha bersama untuk mengurangi/memperkecil priksi-priksi yang ada. Memang di perguruan tinggi banyak orang pintar, banyak teori, yang menyebabkan adanya perbedaan pikiran dan pandangan satu orang dengan orang lain. Tetapi perbedaan ini tentunya tidak dijadikan alasan untuk bertengkar, untuk melakukan kekerasan sasama kita. Rektor UM Purwokerto memahami danya perbedaan-perbedaan tersebut, tetapi jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk pertengkar. Yang ada hendaknya saling menghormati. Sejak awal Rektor UM Purwokerto akan berlaku sistemik dan demokratik (Syamsuhadi Irsyad, wawancara, 11 Mei 2010).

Pelaksanaan dan realisasi tiga pilar *Campus Based Civic education* berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang dosen PKn di Universitas Muhammadiyah Surakarta (16 April 2010) terutama pada perkuliahan materi demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kelemahan pelaksanaannya terutama karena keterbatasan dosen. Karena selama ini yang dapat diamati dan dinilai dosen baru sebatas ranah kognitifnya. Di luar kampus dosen sulit untuk mengamatinya. Tetapi kehidupan dalam kampus sudah dapat dilaksanakan. Dilihat dari pilar konstitusional, statuta universitas dilaksanakan seluruh sivitas akademika. Pelaksanaannya tentunya merupakan penjabaran lebih lanjut dari statuta.

Pelaksanaan pilar kedua, yakni konstitusional, di UM Purwokerto sudah terbiasa mengikuti aturan yang berlaku. Kita melakukan program kegiatan berdasarkan apa yang telah disepakati senat universitas, karena senat merupakan lembaga tertinggi di universitas. Jika suatu saat ternyata yang kita putuskan baik bisa ditinjau kembali, dan jika harus berubah, perlu adanya kesepakatan bersama, atas dasar bahwa kita tidak ada yang sempurna, Pendapat yang ada bisanya didasari oleh ilmu yang kita miliki, sedangkan ilmu yang kita miliki tidak ada yang sempurna, oleh karena itu perlu dibandingkan dengan pendapat yang lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga di UM Purwokerto tidak akan terjadi kekerasan karena adanya perbedaan pendapat.

Menurut Rektor UM Purwokerto, Syamsuhadi Irsyad (wawancara, 11 Mei 2010) bahwa mulai tahun 2008 UM Purwokerto apabila memutuskan sesuatu harus secara bertanggung jawab, harus ada siapa yang harus melaksanakannya, tentunya harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain sistemik harus demokratis, karena kita semua mempunyai hak suara untuk mengemukakan pendapat. Demokrasi memang kadang-kadang agak memperlambat. Tetapi sikap otoriter tentunya akan mengakibatkan kita berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat, oleh karena itu kita juga harus mengutamakan kerukunan. Adanya, friksi-friksi, konflik intern akan menyebabkan kemunduran.

Tentang pilar konstitusional, di UM Purwokerto, segalanya memang didasarkan pada konstitusi, aturan-aturan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang berlaku di kampus, apapun yang sudah menjadi aturan di kampus kita dukung. Jika ada aturan yang tidak sesuai bisa kita evaluasi kembali, jika perlu dirubah. Keputusan Rektor, dekan, jika ternyata tidak tepat harus kita rubah. Oleh karena itu statuta, renstra perlu pengembangan, perlu ditafsirkan, untuk mengambil kebijaksanaan (Rektor UM Purwokerto, wawancara, 11 Mei 2010)

Pelaksanaan dan realisasi tiga pilar *Campus Based Civic educatio*, terutama pilar ketiga di UM Surakarta, menurut Muhibbin (Wawancara, 16 April 2010), berupa pelatihan terhadap para pedagang sayur untuk membuat bronjong dari bambu sebagai tempat dagangan satuan.

Di UM Purwokerto, memberikan sesuatu yang riil bagi kemajuan masyarakat, hasilnya langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti adanya kreativitas mahasiswa dengan mengadakan pendampingan terhadap usaha-usaha kecil, mengadakan masyarakat binaan, dan pada setiap bulan Ramadhan diadakan bakti sosial (Banani Ma'mur, wawancara, 11 Mei 2010).

UM Purwokerto juga mengadakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, yang terkait dengan guru-guru yang belum berkualifikasi S1, sertifikasi guru, pendampingan penelitian tindakan kelas dan lain-lin. Juga kerja sama dengan berbagai instansi untuk memajukan masyarakat (Rektor UM Purwokerto, wawancara, 11 Mei 2010).

Pelaksanaan realisasi ketiga pilar di Universitas Muhammadiyah Purworejo, adalah:

- a. Anti kekerasan. Di UM Purworejo setiap permasalahan yang muncul baik antara pihak pimpinan dengan dosen dan karyawan maupun dengan pihak mahasiswa diselesaikan dengan cara musyawarah
- b. Konstitusional, pelaksanaan kegiatan di UM Purworejo mendasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, seperti dalam jabatan-jabatan struktural.
- c. Memberi sesuatu yang nyata (riil) bagi kemajuan masyarakat :
 - 1) Lulusan (alumnus) UM Purworejo sudah diterima dalam masyarakat.
 - 2) UM Purworejo memberi jasa pelayanan, seperti jasa konsultan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Purworejo.
 - 3) UM Purworejo menjalin kerjasama dengan Pemda dan dengan sekolah-sekolah yang ada di Purworejo (Agus Budi Santoso, Wawancara, 5-8-2010).

e) Dampaknya terhadap Kehidupan di Kampus

Dampaknya seperti adanya demonstrasi mahasiswa, yang terkait dengan informasi tertentu. Yang memang informasi tersebut tidak dapat ditutup-tutupi. Memang mahasiswa sering demonstrasi, tetapi tidak sampai menimbulkan eksekusi yang tidak diharapkan, artinya demonstrasi masih dapat dikatakan secara santun. Dampaknya terhadap kehidupan kampus, memang di permukaan seolah-olah tidak ada masalah, tetapi seperti api dalam sekam, karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, yang dilaksanakan oleh segelintir orang, tetapi apabila ini diketahui oleh banyak orang tentunya dapat meledak (Yulianto, wawancara 16 April 2010)

Pelaksanaan dan realisasi tiga pilar *Campus Based Civic education* selama ini kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, suasananya kondusif, kekerasan fisik maupun psikis hampir tidak ada, tidak ada teror terhadap dosen. Kesetaraan gender di Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah berlangsung dengan baik (Mutholi'in, wawancara. 16 April 2010).

Selama ini di UM Surakarta, selalu mengedepankan konstitusi. Kebijakan-kebijakan universitas disosialisasikan kepada mahasiswa. Bahkan mahasiswa agar membuat aturan sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jika ada friksi-friksi kecil itu merupakan hal yang wajar, tentunya harus dikomunikasikan dengan kebijaksanaan fakultas. Fakultas pun menghargai mahasiswa dengan cara agar mahasiswa memberikan aspirasinya ke fakultas untuk kemudian disalurkan (Muhibbin, wawancara, 16 April 2010).

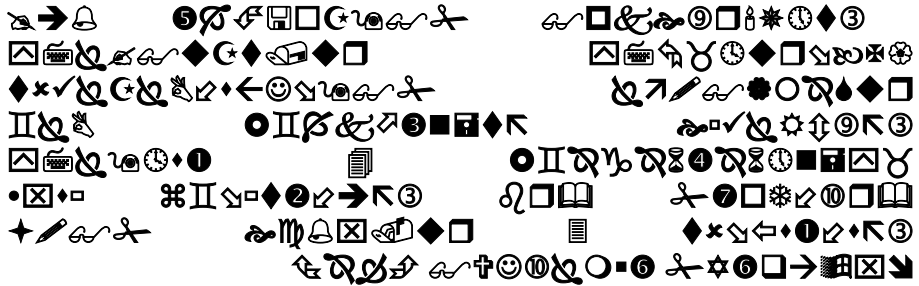
Dampaknya terhadap kehidupan di kampus UM Purwokerto, dengan adanya pengembangan kreativitas dan potensi mahasiswa, menurut PR III UM Purwokerto adalah adanya stabilitas kampus yang dinamis, dan konflik-konflik intern dan antar mahasiswa/organisasi mahasiswa beberapa tahun ini tidak nampak (Banani Ma'mur, wawancara, 11 Mei 2010).

Dampak dari pelaksanaan ketiga pilar tersebut terhadap kehidupan di kampus UM Purworejo adalah : Untuk anti kekerasan dampaknya secara positif yaitu kehidupan kampus yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis. Untuk konstitusional, maka dampak positifnya adalah kehidupan masyarakat kampus yang mencerminkan ketaatan pada hukum/aturan-aturan. Untuk UM Purworejo memberi sesuatu yang positif maka dampaknya UM Purworejo dapat memberi andil bagi kemajuan pembangunan di daerah Purworejo (Agus Budi Santoso, Wawancara, 5-8-2010).

Upaya-upaya lain untuk mewujudkan *Campus Based civic Education* di perguruan tinggi Muhammadiyah diperlukan juga adanya:

- 1) Aturan tentang adab bermusyawarah, yang merupakan norma yang harus ditaati oleh segenap civitas akademika dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan terbaik;
- 2) Adanya aturan tentang adab dan sifat dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah, yang merupakan panduan yang harus ditaati oleh segenap dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah.
- 3). Adanya aturan tentang tertib berbusana bagi mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengatur tertib busana dan penampilan mahasiswa yang intinya sebagai berikut :



59. *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Ahzab, 33:59)*

[1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Berdasarka ayat di atas dijabarkan Tewrtib busana dan penampilan bagi mahasiswi :

- 1). Menutup aurat (seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan)
- 2). Tidak menonjolkan bentuk tubuh:
 - tidak ketat/tarnsparan
 - menutupkan kerudung sampai ke dada
 - kain baju sampai di bawah pinggang (30 cm dari pinggang)
- 3). Tidak mencolok, baik model maupun warna
- 4). Tidak menggunakan make up dan perhiasan yang berlebihan
- 5). Tidak bergambar dan bertulisan yang bertentangan dengan nilai akhlak Islam (mengundang unsur pornografi, provokasi, kekerasan, dll).
- 6). Bersepatu dan berkaos kaki.

2. Sikap Demokratis Mahasiswa

a. Perbedaan Sikap Demokkratis Mahasiswa Sebelum dan Setelah Mendapatkan Matakuliah PKn

Hasil uji t dengan SPSS perbedaan sikap demokkratis mahasiswa sebelum dan setelah mendapatkan matakuliah PKn dengan taraf kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan 123 diperoleh nilai harga t/t hitung 107,217. Sedangkan harga kritik t tabel adalah 1,66. Berarti t hitung > daripada t tabel (107, 217 > 1,66). Dengan demikian Hi dapat diterima dan Ho ditolak, yang berarti pula ada

perbedaan yang signifikan sikap demokratis mahasiswa sebelum dan setelah mendapatkan matakuliah PKn.

b. Hubungan antara Pembelajaran PKn dengan Sikap Demokratis Mahasiswa

Hasil uji r / korelasi dengan SPSS hubungan antara pembelajaran PKn dengan sikap demokratis mahasiswa diperoleh nilai r koefisien 0,862. Yang berarti ada hubungan positif yang sangat kuat (+0,70 ke atas). Artinya semakin baik proses pembelajaran PKn akan menghasilkan sikap demokratis mahasiswa yang semakin baik pula, atau sebaliknya. Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara pembelajaran PKn dengan sikap demokratis mahasiswa

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, dapat disimpulkan:

- a. Untuk mewujudkan *campus based civic education* di Perguruan Tinggi Muhammadiyah diperlukan (a) lembaga yang demokratis yakni lembaga yang anti kekerasan, konstitusional dan memberikan manfaat riil bagi kemajuan masyarakat; (b) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara; (c) pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori.
- b. Ada perbedaan yang signifikan sikap demokratis mahasiswa sebelum dan setelah memperoleh pembelajaran PKn
- c. Ada hubungan yang signifikan antara tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn dengan sikap demokratis mahasiswa setelah memperoleh pembelajaran PKn

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang diajukan adalah :

- a. Lembaga, Perguruan tinggi Muhammadiyah hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan dan memantapkan *campus based civic education* yang anti kekerasan, konstitusional dan memberikan manfaat riil bagi kemajuan masyarakat.
- b. Dosen PKn di Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya:
 - 1) senantiasa mengembangkan proses pembelajaran PKn secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

- 2) menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara
 - 3) pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori.
- c. Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah hendaknya mengembangkan model *student government* dan penguatan etos kewirausahaan (*entrepreneurship*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, S. (1995). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Basrie, C.,(2002). *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Best W. (1977). *Research In Education*. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.
- Borg,W.R & Hall,M.D.,(1989). *Educational Research*, Longman Group, London.
- Chamim, A.I., et al. (2003), *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, The Asia Foundation.
- Cipto, B.,(2002). *Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education)* . Yogyakarta : LP3 UMY.
- Creswell, W. (1994). *Research Desigh Qualitative & Quantitative Approaches*, : Sage Publications, New Delhi.
- Djohar, (1999). *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran*. Yogyakarta:IKIP Negeri Yogyakarta.
- Ghozali, I.(2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kerlinger N, (1986). *Foundation of Behavioral Reserarch Third Edition*, Eugene. Oregon:Winston Inc.All.

- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah (2004), *Direktori Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)*. Yogyakarta : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah.
- Riyanto, M. (2002). *Pendekatan dan Metode Pembelajaran*. Malang : Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Prenada Kencana.
- Ruseffendi, H.E.T, dan Ahmad Sanusi, (1998). *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksata Lainnya*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Sulaiman, W. (2002). *Jalan Pintas Menguasai SPSS 10*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Tukiran, (2005) *Efektivitas Implementasi Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portofolio*. Disertasi pada Program Pascasarjana UPI: tidak diterbitkan.
- Tukiran, (2006). *Pengembangan Model pembelajaran Berbasis Portofolio pada Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Nilai-nilai Demokrasi Mahasiswa*. Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Purwokerto : tidak diterbitkan.
- Ubaidillah, A. (2000). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*: IAIN Jakarta Press.. Jakarta
- Unesco, (1998). *Learning to Live Together in Peace and Harmony*. Bangkok : Unesco Proap.
- Unesco, (1999). *Learning: The Treasure Within*. (Terjemahan Napitupulu) Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Winataputra, U.S. (2000). *Kata Pengantar, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Zamroni, (2001), *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- Azra, A.(2002). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi Indonesia. Warta PTM, Edisi (2) Th. XV, 8-10.

- Buchori, M. (2000). Reformasi Pendidikan, Jakarta : *Analisis CSIS Tahun XXIX/2000*, No.(3), 242-255.
- Muhaimin,Y.(2002). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Warta PTM, Edisi Khusus (1) Th.XIV*, 10-11.
- Rosyada, D.(2003). Menciptakan Experimental Democracy Melalui Pembelajaran CE. *Warta PTM, Edisi (7) Tahun XV*,8-18.
- Zamroni, (2003c). Pendidikan Kewarganegaraan: Tradisi dalam memelihara Kehidupan Majemuk, *Warta PTM Edisi7 Th.XV*, 10-11.
- Zamroni,(2003a). Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi, *Warta PTM Edisi (1) Tahun XV*, 8-11.
- Brodjonegoro, S.S.(2000). *Prospek Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Makalah dalam Pengarahan pada Penataran Dosen Pancasila di Jakarta, Nopember,2000.
- Zamroni, (2003b), *Peran pendidikan Tinggi dalam Menuju Kehidupan Masyarakat yang Demokratis*, Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional Civic Education di Perguruan Tinggi di Yogyakarta, 8-9 Maret 2003.
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,(2000). *Penyempurnaan (GBPP) (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi di Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2003).Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
- Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, Solo: PT Pabelan.
- Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Ditjen Dikdasmen Departemen pendidikan Nasional.
- International Commission of Jurist, (2003). PKn Kita Gagal. Tersedia on line : www.aksara.org/jurnal-detail.asp.item-id=3D275 (10 September 2003)
- Winataputra, (2003). Pendidikan Kewarganegaraan, Tersedia on line: [www.kompas.com/kompas.cetak/0101/24/dikbud/pkn do9.htm](http://www.kompas.com/kompas.cetak/0101/24/dikbud/pkn%20do9.htm). (10 September 2003).